

Prosedur Penginputan Rencana Kerja dan Belanja Berbasis Aplikasi SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Rofiatun Fadilah¹, Ayyu Ainin Mustafidah²

¹ Akutansi Syariah, UIN Khas Jember

² Akutansi Syariah, UIN Khas Jember

pelajardila@gmail.com, ayyuaininmustafidah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur penginputan Rencana Kerja Belanja berbasis aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada proses penginputan Rencana Kerja Belanja melalui aplikasi SIPD. Data diperoleh melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), observasi terhadap proses kerja, serta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penginputan pada Bidang Perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penginputan Rencana Kerja Belanja melalui SIPD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan dan pemeriksaan kelengkapan data, penginputan data ke dalam sistem, pemeriksaan kesesuaian antara data yang diinput dengan dokumen perencanaan, perbaikan apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian, serta penyelesaian proses penginputan. Setiap tahapan membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan pemahaman pengguna terhadap struktur perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dapat memengaruhi kelancaran proses penginputan, antara lain kemampuan sumber daya manusia dalam memahami penggunaan aplikasi, kesalahan dalam memasukkan data, keterbatasan pemahaman terhadap struktur program dan kegiatan, serta kendala teknis berupa jaringan internet yang tidak stabil dan gangguan pada aplikasi SIPD. Oleh karena itu, penerapan prosedur yang sistematis, pemeriksaan data secara berkala, peningkatan kemampuan pengguna, serta dukungan teknis yang memadai diperlukan untuk mendukung kualitas informasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Belanja, Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendukung. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Setiap tahapan tersebut membutuhkan data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam penyediaan maupun penginputan data pada tahap awal dapat memengaruhi tahapan berikutnya, sehingga ketelitian dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD dikembangkan untuk mendukung keterintegrasian informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi pembangunan dan informasi keuangan daerah. Penerapan SIPD juga diarahkan untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran sehingga data yang digunakan oleh pemerintah daerah dapat dikelola secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Melalui SIPD, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan data perencanaan dan penganggaran yang lebih valid, terintegrasi, serta dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kementerian Dalam Negeri juga menempatkan SIPD sebagai instrumen yang mendukung integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah serta penyediaan data pemerintahan yang dapat digunakan secara lebih efektif dan akuntabel (Kementerian Dalam Negeri, 2022). Dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, penginputan rencana kerja belanja merupakan salah satu kegiatan yang membutuhkan perhatian karena data yang dimasukkan ke dalam sistem menjadi bagian dari informasi yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran. Penginputan tidak hanya berkaitan dengan memasukkan data ke dalam aplikasi, tetapi juga membutuhkan kesesuaian antara data yang tersedia dengan dokumen perencanaan, program, kegiatan, subkegiatan, rekening belanja, volume, satuan, serta komponen anggaran yang digunakan. Oleh karena itu, pengguna SIPD dituntut memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme perencanaan dan penganggaran sekaligus kemampuan dalam mengoperasikan sistem. Ketidaksesuaian antara data yang telah disiapkan dengan struktur yang tersedia dalam aplikasi dapat menyebabkan proses penginputan harus diperbaiki atau disesuaikan kembali.

Permasalahan dalam proses penginputan rencana kerja belanja melalui SIPD tidak hanya berasal dari kesalahan data, tetapi juga dapat berkaitan dengan faktor sumber daya manusia dan faktor teknis. Pengguna yang belum memahami alur sistem atau struktur penganggaran dapat mengalami kesulitan ketika melakukan penginputan. Selain itu, gangguan jaringan internet, keterbatasan akses, *server* yang sulit diakses, perubahan menu aplikasi, maupun kendala teknis lainnya dapat menghambat penyelesaian proses penginputan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SIPD tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya aplikasi, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana prosedur penginputan dilaksanakan oleh pengguna dalam kondisi kerja yang sebenarnya. Dengan demikian, diperlukan prosedur yang sistematis, pemeriksaan data secara berulang, koordinasi antarpengguna, serta kemampuan aparatur dalam memahami sistem agar kesalahan penginputan dapat diminimalkan. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena data perencanaan dan penganggaran yang dimasukkan melalui SIPD memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Apabila proses penginputan dilakukan secara tidak teliti, terdapat kemungkinan munculnya ketidaksesuaian data yang dapat memengaruhi proses pada tahapan berikutnya. Sebaliknya, apabila penginputan dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas dan disertai pemeriksaan data, kualitas informasi yang dihasilkan dapat lebih terjamin. Dengan demikian, solusi yang diperlukan bukan hanya berupa peningkatan kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi, tetapi juga penguatan pemahaman terhadap alur perencanaan dan penganggaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum penginputan, verifikasi data setelah penginputan, serta koordinasi apabila ditemukan permasalahan pada sistem. Upaya tersebut diperlukan agar penggunaan SIPD dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu mendukung tertib administrasi perencanaan dan penganggaran pada organisasi perangkat daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penerapan SIPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tumija dan Erlambang (2023) meneliti implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIPD digunakan sebagai instrumen dalam mendukung proses perencanaan anggaran, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan penerapan SIPD dipengaruhi oleh kesiapan pengguna dan kondisi teknis sistem. Penelitian Tumija, Hendra, dan Sinurat (2023) mengenai penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang menunjukkan bahwa SIPD telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi masih terdapat hambatan berupa pelatihan yang belum optimal, kapasitas *server* yang belum memadai, serta permasalahan pada beberapa menu sistem. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya kebutuhan strategi untuk mengatasi hambatan dalam penerapan SIPD agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih baik. Selanjutnya, Rezkiaty, Alam, dan Tenriwaru (2023) melakukan evaluasi implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah berjalan secara optimal, tetapi tetap diperlukan kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam menghadapi kendala yang berkaitan dengan penerapan sistem. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penggunaan SIPD tidak hanya dipengaruhi oleh sistem itu sendiri, tetapi juga oleh koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem. Penelitian Hendra dan Pradana (2023) mengenai penerapan SIPD dalam penyusunan anggaran di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain kurangnya sosialisasi, keterbatasan pengetahuan pengguna, serta kendala akses *server*. Temuan tersebut memperkuat bahwa faktor sumber daya manusia dan kesiapan teknis merupakan bagian penting dalam menentukan kelancaran penggunaan SIPD pada proses penyusunan anggaran. Penelitian Onta, Engka, dan Masinambow (2024) mengenai perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui SIPD menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIPD berkaitan dengan perubahan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan atau realisasi, dan pertanggungjawaban. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pengaruh penggunaan SIPD terhadap proses pengelolaan anggaran pada perangkat daerah. Namun, fokus penelitian masih berada pada analisis perencanaan dan penganggaran secara lebih luas, bukan pada tahapan teknis penginputan rencana kerja belanja yang dilakukan oleh pengguna pada tingkat OPD.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai SIPD telah berkembang dalam berbagai fokus, mulai dari implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD, hingga penguatan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan adanya pola permasalahan yang relatif serupa, terutama berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, pemahaman pengguna terhadap sistem, komunikasi dan koordinasi, kualitas jaringan, kapasitas *server*, serta kendala teknis aplikasi. Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih lebih banyak membahas penerapan SIPD dari perspektif implementasi sistem secara umum, efektivitas pengelolaan keuangan, atau penyusunan anggaran secara keseluruhan. Belum banyak penelitian yang secara khusus memusatkan perhatian pada prosedur operasional penginputan rencana kerja belanja melalui SIPD dan menggambarkan secara rinci tahapan yang dilakukan sejak persiapan data hingga penyelesaian proses penginputan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap dalam penelitian mengenai SIPD, terutama pada fokus kajian, lokasi, proses, dan penanganan kendala. Penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi SIPD secara luas, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji prosedur penginputan rencana kerja belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, mulai dari persiapan data, penginputan, pemeriksaan, perbaikan, hingga penyelesaian, termasuk kendala dan upaya mengatasinya. Kebaruan penelitian terletak pada fokus empiris terhadap pelaksanaan prosedur penginputan pada tingkat OPD yang diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai penggunaan SIPD serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan ketelitian penginputan, pemeriksaan data, kompetensi pengguna, dan efektivitas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis prosedur penginputan rencana kerja belanja melalui aplikasi SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses penginputan, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis dalam mendukung pelaksanaan penginputan yang lebih tertib, teliti,

efektif, dan sesuai dengan prosedur, serta secara akademis dapat memperkaya kajian mengenai penerapan sistem informasi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan sistematis mengenai prosedur penginputan Rencana Kerja Belanja melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel, melainkan untuk mendeskripsikan secara empiris tahapan pelaksanaan penginputan, penerapan prosedur dalam kegiatan operasional, kendala yang ditemukan, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala selama proses penginputan berlangsung. Penelitian dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya pada Bidang Perencanaan, sebagai lokasi pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Kegiatan penelitian dilaksanakan selama periode PPL, yaitu mulai 1 Juli 2026 sampai dengan 27 Agustus 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada keterlibatan peneliti dalam kegiatan PPL sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung pelaksanaan proses penginputan Rencana Kerja Belanja melalui aplikasi SIPD dalam kondisi operasional yang sebenarnya. Subjek penelitian adalah pihak yang terlibat dalam proses penginputan Rencana Kerja Belanja melalui aplikasi SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan objek penelitian adalah prosedur penginputan Rencana Kerja Belanja melalui aplikasi SIPD. Penentuan subjek dan objek tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu memperoleh gambaran mengenai bagaimana prosedur penginputan dilaksanakan mulai dari tahap persiapan data sampai dengan penyelesaian penginputan. Prosedur yang diamati meliputi persiapan dokumen dan data, pemeriksaan kelengkapan data, proses memasukkan data ke dalam aplikasi SIPD, pemeriksaan kesesuaian hasil input, perbaikan apabila ditemukan kesalahan, serta penyelesaian proses penginputan.

Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis agar proses pengumpulan dan analisis data dapat menghasilkan gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan penelitian dimulai dari persiapan, observasi awal, pengumpulan data, pengamatan penerapan prosedur penginputan, identifikasi kendala, analisis data, penyajian hasil, hingga penarikan kesimpulan. Rangkaian tahapan penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

No.	Tahapan	Kegiatan yang Dilakukan	Hasil yang Diperoleh
1.	Persiapan penelitian	Menentukan fokus penelitian, lokasi penelitian, objek yang diamati, serta menyiapkan kebutuhan observasi dan dokumentasi	Fokus dan arah penelitian
2.	Observasi awal	Mengamati kondisi lingkungan kerja dan memperoleh gambaran awal mengenai pelaksanaan penginputan Rencana Kerja Belanja melalui SIPD	Gambaran awal proses dan alur penginputan
3.	Pengumpulan data	Melakukan observasi terhadap kegiatan penginputan dan mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian	Data mengenai prosedur dan pelaksanaan penginputan
4.	Pengamatan penerapan prosedur	Mengamati tahapan persiapan data, pemasukan data, pemeriksaan, perbaikan, dan penyelesaian penginputan melalui SIPD	Uraian tahapan prosedur penginputan
5.	Identifikasi kendala	Mengidentifikasi hambatan atau kesalahan yang ditemukan selama proses penginputan serta mengamati tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya	Data mengenai kendala dan upaya penanganannya
6.	Analisis data	Mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan mendeskripsikan data hasil observasi dan dokumentasi sesuai fokus penelitian	Informasi yang telah tersusun berdasarkan fokus penelitian
7.	Penyajian hasil	Menyusun hasil penelitian secara deskriptif mengenai prosedur penginputan, kendala, dan upaya penanganannya	Gambaran sistematis mengenai hasil penelitian
8.	Penarikan kesimpulan	Menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis dan kondisi empiris yang ditemukan selama kegiatan di lapangan	Kesimpulan penelitian

Berdasarkan Tabel 1, penelitian dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap persiapan, observasi awal, pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi, pengamatan penerapan prosedur penginputan Rencana Kerja Belanja melalui SIPD, hingga identifikasi kendala dan upaya penanganannya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk uraian sesuai fokus penelitian dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan kondisi empiris

yang ditemukan selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Secara keseluruhan, alur penelitian dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa setiap tahapan penelitian dilakukan secara berurutan dan saling berkaitan. Data yang diperoleh pada tahap pengumpulan data menjadi dasar dalam pengamatan penerapan prosedur, identifikasi kendala, dan proses analisis. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menyusun penyajian hasil dan menarik kesimpulan berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan. Pengujian metode dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan fokus penelitian. Data hasil observasi dibandingkan dan dilengkapi dengan dokumentasi yang tersedia sehingga informasi mengenai prosedur penginputan tidak hanya didasarkan pada satu sumber data. Pengamatan juga dilakukan terhadap tahapan proses secara langsung selama kegiatan PPL untuk memastikan bahwa uraian yang dihasilkan menggambarkan pelaksanaan prosedur sebagaimana berlangsung dalam kegiatan operasional. Dengan demikian, penerapan metode penelitian diarahkan untuk memperoleh data yang relevan, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Prosedur Penginputan Rencana Kerja Belanja melalui SIPD

Hasil Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Bidang Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, penginputan Rencana Kerja dan Belanja melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu kegiatan yang mendukung proses perencanaan dan penganggaran daerah. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan membutuhkan ketelitian agar data yang dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan dokumen perencanaan serta kebutuhan belanja yang telah ditetapkan. Penginputan Rencana Kerja dan Belanja tidak hanya berupa kegiatan memasukkan data ke dalam aplikasi, tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari persiapan data hingga penyelesaian proses penginputan. Berdasarkan hasil pengamatan, tahapan tersebut meliputi berikut: 1) Tahap pertama adalah mempersiapkan data yang menjadi dasar penginputan. Data yang akan dimasukkan ke dalam SIPD terlebih dahulu disesuaikan dengan dokumen perencanaan dan kebutuhan belanja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Pada tahap ini, data diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Data yang berkaitan dengan kebutuhan belanja perlu disesuaikan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Persiapan data diperlukan agar proses penginputan memiliki dasar yang jelas dan mengurangi kemungkinan kesalahan pada tahap berikutnya. 2) Setelah data dipersiapkan, data dimasukkan ke dalam aplikasi SIPD sesuai dengan struktur informasi yang tersedia dalam sistem. Pada tahap ini, pengguna perlu memperhatikan kesesuaian antara data yang dimasukkan dengan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penginputan membutuhkan ketelitian karena data yang dimasukkan berkaitan dengan perencanaan dan kebutuhan belanja. Kesalahan dalam memasukkan data dapat menyebabkan informasi dalam sistem tidak sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan aplikasi perlu disertai dengan pemahaman terhadap data yang sedang dikelola. 3) Setelah proses penginputan dilakukan, data yang telah dimasukkan diperiksa kembali. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang terdapat dalam SIPD dengan data atau dokumen yang menjadi dasar penginputan. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui adanya kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama proses input. Data yang belum sesuai tidak langsung diselesaikan, tetapi terlebih dahulu diperiksa agar dapat dilakukan perbaikan apabila diperlukan. 4) Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian, dilakukan perbaikan terhadap data yang telah dimasukkan. Perbaikan dilakukan dengan mengacu pada data atau dokumen yang menjadi dasar penginputan. Tahap perbaikan menunjukkan bahwa penginputan merupakan proses yang membutuhkan pemeriksaan dan koreksi. Dengan adanya perbaikan, data dalam sistem dapat disesuaikan kembali dengan dokumen perencanaan dan kebutuhan belanja. 5) Tahap terakhir adalah penyelesaian proses penginputan setelah data diperiksa dan dinyatakan sesuai. Penyelesaian dilakukan setelah tidak terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian yang masih perlu diperbaiki. Berdasarkan tahapan tersebut, prosedur penginputan Rencana Kerja dan Belanja melalui SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dapat dirangkum menjadi persiapan data - penginputan data - pemeriksaan -

perbaikan - penyelesaian. Tahapan tersebut saling berkaitan karena ketepatan data pada tahap persiapan menjadi dasar bagi penginputan, sedangkan pemeriksaan dan perbaikan digunakan untuk memastikan kesesuaian data sebelum proses diselesaikan.

B. Kendala dalam Penginputan Rencana Kerja Belanja melalui SIPD

Pelaksanaan penginputan Rencana Kerja dan Belanja melalui SIPD membutuhkan kemampuan pengguna dalam memahami aplikasi, prosedur penginputan, serta struktur data perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan hasil pengamatan, proses penginputan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi, tetapi juga oleh ketelitian dalam memasukkan data dan kondisi teknis yang mendukung penggunaan sistem. Kendala yang muncul dalam proses penginputan dapat dikelompokkan menjadi kendala yang berkaitan dengan pengguna dan kendala yang berkaitan dengan aspek teknis. Kedua aspek tersebut dapat memengaruhi kelancaran proses penginputan apabila tidak ditangani dengan baik, Sebagai berikut : 1) Pengguna SIPD perlu memahami alur penginputan dan cara menyesuaikan data dengan struktur yang tersedia dalam aplikasi. Penggunaan aplikasi tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman mengenai tahapan pekerjaan yang harus dilakukan. Pengguna yang belum memahami alur atau prosedur penginputan dapat mengalami kesulitan dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses penginputan membutuhkan penyesuaian atau pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aplikasi dan prosedur menjadi salah satu hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses penginputan. 2) Kendala lainnya adalah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memasukkan data. Data yang dimasukkan ke dalam SIPD harus sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar penginputan. Kesalahan dalam memasukkan informasi dapat menyebabkan data dalam sistem tidak sesuai dengan data yang telah dipersiapkan. Apabila kesalahan ditemukan setelah proses input dilakukan, data perlu diperiksa dan diperbaiki kembali. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pekerjaan harus dilakukan secara berulang pada bagian yang mengalami kesalahan. Oleh karena itu, ketelitian pengguna menjadi hal yang penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan selama proses penginputan. 3) Penginputan Rencana Kerja dan Belanja juga membutuhkan pemahaman terhadap struktur perencanaan dan penganggaran. Data yang dimasukkan perlu disesuaikan dengan program, kegiatan, subkegiatan, serta kebutuhan belanja yang telah direncanakan. Pemahaman terhadap struktur tersebut diperlukan agar data dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Apabila pengguna kurang memahami hubungan antara data perencanaan dan penganggaran, proses penginputan dapat mengalami kesulitan dan membutuhkan pemeriksaan atau penyesuaian lebih lanjut. 4) Selain kendala dari sisi pengguna, proses penginputan melalui SIPD juga dapat dipengaruhi oleh kondisi teknis. Penggunaan aplikasi membutuhkan jaringan internet dan akses terhadap sistem. Apabila jaringan tidak stabil atau sistem mengalami gangguan, proses penginputan dapat menjadi kurang lancar. Kendala teknis dapat menyebabkan pengguna mengalami kesulitan ketika mengakses atau mengelola data melalui aplikasi. Oleh karena itu, keberhasilan proses penginputan tidak hanya bergantung pada kemampuan pengguna, tetapi juga membutuhkan dukungan jaringan dan sistem yang dapat digunakan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, kendala dalam penginputan Rencana Kerja dan Belanja melalui SIPD berkaitan dengan pemahaman pengguna terhadap aplikasi dan prosedur, kesalahan dalam memasukkan data, pemahaman terhadap struktur perencanaan dan penganggaran, serta kendala teknis berupa jaringan dan sistem. Kendala tersebut dapat memengaruhi kelancaran proses sehingga membutuhkan pemeriksaan dan penanganan agar proses penginputan dapat diselesaikan dengan baik.

C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penginputan Rencana Kerja dan Belanja melalui SIPD

Upaya mengatasi kendala dalam penginputan dilakukan dengan memperhatikan tahapan pemeriksaan dan perbaikan yang terdapat dalam proses penginputan. Upaya tersebut bertujuan agar kendala atau kesalahan yang ditemukan tidak menyebabkan data yang tidak sesuai tetap tersimpan dalam sistem. 1) Melakukan Pemeriksaan Data, Pemeriksaan data menjadi salah satu upaya utama dalam mengurangi kesalahan penginputan. Pemeriksaan dilakukan terhadap data yang akan dimasukkan maupun terhadap hasil penginputan. Pemeriksaan sebelum penginputan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang tersedia telah sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar. Setelah data dimasukkan ke dalam SIPD, pemeriksaan kembali dilakukan untuk mengetahui apakah informasi yang terdapat dalam sistem telah sesuai dengan data awal. Pemeriksaan secara berulang diperlukan karena kesalahan dapat terjadi pada saat proses pemasukan data. Dengan melakukan pemeriksaan, kesalahan dapat diketahui lebih awal sehingga dapat diperbaiki sebelum proses penginputan diselesaikan. 2) Melakukan Perbaikan dan Penyesuaian Data, Apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian, dilakukan perbaikan terhadap data yang telah dimasukkan. Perbaikan dilakukan dengan mengacu pada data atau dokumen yang menjadi dasar penginputan. Perbaikan tersebut bertujuan agar data yang terdapat dalam SIPD sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Data yang telah diperbaiki kemudian diperiksa kembali untuk memastikan bahwa kesalahan telah diselesaikan. Dengan demikian, pemeriksaan dan perbaikan membentuk proses yang saling berkaitan. Pemeriksaan digunakan untuk menemukan kesalahan, sedangkan perbaikan digunakan untuk menyesuaikan kembali data yang belum sesuai. 3) Meningkatkan Ketelitian dalam Penginputan, Ketelitian pengguna menjadi bagian penting dalam mengatasi kemungkinan terjadinya kesalahan. Pengguna perlu memperhatikan data yang dimasukkan dan membandingkannya dengan data yang telah dipersiapkan. Ketelitian tidak hanya diperlukan pada saat memasukkan data, tetapi juga pada saat melakukan pemeriksaan. Pengguna perlu memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam sistem telah sesuai dengan dokumen dan kebutuhan perencanaan serta penganggaran. Dengan meningkatkan ketelitian, kemungkinan terjadinya kesalahan input dapat diminimalkan. Selain itu, ketelitian juga membantu pengguna menemukan ketidaksesuaian lebih cepat sehingga proses perbaikan dapat segera dilakukan. 4) Penyesuaian Proses ketika Terjadi Kendala Teknis, Kendala teknis seperti jaringan internet atau gangguan pada sistem dapat menghambat proses penginputan. Ketika kondisi tersebut terjadi, proses penginputan perlu disesuaikan dengan

kondisi sistem yang tersedia. Penginputan dapat dilanjutkan kembali ketika akses terhadap aplikasi telah memungkinkan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar proses tidak dilakukan secara terburu-buru pada saat sistem belum dapat digunakan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya mengatasi kendala dalam proses penginputan dilakukan melalui pemeriksaan data, perbaikan dan penyesuaian data, peningkatan ketelitian, serta penyesuaian proses ketika terjadi kendala teknis. Upaya tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan prosedur penginputan dan bertujuan menjaga agar data yang dimasukkan tetap sesuai dengan dokumen dan kebutuhan perencanaan serta penganggaran.

Pembahasan

A. Penerapan Prosedur Penginputan melalui SIPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penginputan Rencana Kerja dan Belanja melalui SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, yaitu persiapan data, penginputan, pemeriksaan, perbaikan, dan penyelesaian. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penginputan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan memasukkan data ke dalam aplikasi, tetapi sebagai rangkaian kegiatan yang membutuhkan ketelitian sejak tahap awal hingga proses diselesaikan. Persiapan data menjadi dasar bagi pelaksanaan penginputan. Data yang akan dimasukkan harus dipersiapkan berdasarkan dokumen yang menjadi dasar perencanaan dan kebutuhan belanja. Tahap ini penting karena kualitas data awal akan memengaruhi proses selanjutnya. Apabila data yang dipersiapkan tidak lengkap atau tidak sesuai, maka proses penginputan dapat mengalami kesulitan dan membutuhkan penyesuaian kembali. Tahap berikutnya adalah penginputan data ke dalam SIPD. Pada tahap ini, pengguna memasukkan informasi berdasarkan data yang telah dipersiapkan. Pengguna perlu memperhatikan kesesuaian data dengan struktur yang tersedia dalam sistem. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan teknis menggunakan aplikasi harus disertai dengan pemahaman terhadap substansi data perencanaan dan penganggaran. Setelah data dimasukkan, dilakukan pemeriksaan terhadap hasil penginputan. Pemeriksaan berfungsi sebagai pengendalian untuk memastikan bahwa data yang telah dimasukkan sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar. Apabila ditemukan kesalahan, dilakukan perbaikan sebelum proses diselesaikan. Dengan demikian, pemeriksaan dan perbaikan merupakan bagian penting dari prosedur penginputan karena membantu menjaga kesesuaian data. Hasil tersebut menunjukkan bahwa prosedur penginputan melalui SIPD memiliki hubungan yang erat antara aspek teknologi dan aspek manusia. SIPD menyediakan sarana untuk melakukan pengelolaan data secara elektronik, sedangkan pengguna memiliki peran dalam mempersiapkan, memasukkan, memeriksa, dan memperbaiki data. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi tidak dapat dipisahkan dari ketelitian dan pemahaman pengguna. Hasil penelitian ini sejalan dengan Andhayani (2020) yang membahas pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Latifah, Budiati, dan Putranto (2023) juga menunjukkan bahwa SIPD digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan administrasi pemerintahan daerah. Sementara itu, Kumalasari dan Fanida (2024) menunjukkan bahwa penggunaan SIPD berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Meskipun memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih khusus, yaitu prosedur penginputan Rencana Kerja dan Belanja pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Penelitian tidak membahas implementasi SIPD secara keseluruhan, tetapi memusatkan perhatian pada tahapan operasional penginputan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Penginputan Rencana Kerja dan Belanja melalui SIPD

Pelaksanaan prosedur penginputan tidak terlepas dari berbagai kondisi yang dapat memengaruhi kelancaran pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dapat berkaitan dengan kemampuan pengguna dalam memahami aplikasi dan data, ketelitian dalam memasukkan informasi, pemahaman terhadap struktur perencanaan dan penganggaran, serta kondisi teknis berupa jaringan dan sistem. Kemampuan pengguna menjadi salah satu aspek penting karena penggunaan SIPD membutuhkan pemahaman terhadap alur penginputan sekaligus pemahaman terhadap data yang dikelola. Pengguna yang memahami sistem akan lebih mudah menyesuaikan data dengan struktur yang tersedia. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman dapat menyebabkan proses penginputan membutuhkan waktu dan pemeriksaan yang lebih banyak. Kesalahan input juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem harus sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar. Kesalahan dalam memasukkan data dapat menyebabkan informasi dalam sistem tidak sesuai sehingga diperlukan perbaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketelitian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penginputan. Selain itu, pemahaman terhadap struktur perencanaan dan penganggaran juga memiliki peranan penting. Pengguna perlu memahami hubungan antara program, kegiatan, subkegiatan, dan kebutuhan belanja agar informasi yang dimasukkan dapat ditempatkan secara tepat. Dengan demikian, kemampuan menggunakan aplikasi saja belum cukup apabila tidak disertai pemahaman terhadap substansi data. Kendala teknis juga dapat memengaruhi proses penginputan. Penggunaan SIPD membutuhkan akses jaringan dan sistem yang memadai. Apabila terjadi gangguan jaringan atau sistem, proses penginputan dapat terhambat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelancaran penerapan SIPD dipengaruhi oleh keterkaitan antara sumber daya manusia dan dukungan teknis. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian Tumija dan Erlambang (2023) yang menunjukkan adanya kendala sumber daya manusia dan aspek teknis dalam implementasi SIPD pada perencanaan anggaran daerah. Rezkiaty, Alam, dan Tenriwaru (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah masih membutuhkan penanganan terhadap berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Namun, penelitian ini tidak menempatkan kendala tersebut sebagai fokus utama implementasi SIPD secara keseluruhan. Kendala dibahas dalam kaitannya dengan prosedur penginputan Rencana Kerja dan Belanja. Dengan demikian, kendala dipahami sebagai faktor yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan prosedur penginputan pada tingkat OPD.

C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Penginputan

Upaya mengatasi kendala dalam proses penginputan dilakukan dengan memperkuat tahapan pemeriksaan dan perbaikan data. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian data sebelum dan setelah proses penginputan. Apabila ditemukan kesalahan, dilakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan data atau dokumen yang menjadi dasar. Pemeriksaan menjadi penting karena proses penginputan melibatkan berbagai informasi yang saling berkaitan. Kesalahan pada salah satu bagian data dapat menyebabkan informasi yang terdapat dalam sistem tidak sesuai. Oleh sebab itu, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah untuk mengidentifikasi kesalahan sebelum proses diselesaikan. Perbaikan dan penyesuaian data menjadi langkah lanjutan ketika ditemukan ketidaksesuaian. Data yang tidak sesuai tidak dibiarkan, tetapi disesuaikan kembali berdasarkan data yang menjadi dasar. Setelah dilakukan perbaikan, pemeriksaan kembali diperlukan untuk memastikan bahwa data telah sesuai. Selain pemeriksaan dan perbaikan, ketelitian pengguna juga menjadi bagian penting dalam mengatasi kendala. Ketelitian diperlukan sejak tahap persiapan data, penginputan, hingga pemeriksaan. Pengguna harus memperhatikan informasi yang dimasukkan dan memastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan dokumen yang digunakan. Sementara itu, ketika kendala teknis berupa jaringan atau sistem terjadi, proses penginputan disesuaikan dengan kondisi yang tersedia. Proses dapat dilanjutkan ketika sistem telah dapat digunakan kembali. Penyesuaian tersebut diperlukan agar proses penginputan tetap memperhatikan ketepatan data dan tidak dilakukan dalam kondisi sistem yang tidak mendukung. Upaya tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan dukungan teknis. Tumija dan Erlambang (2023) menunjukkan bahwa kendala sumber daya manusia dan aspek teknis merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam penerapan SIPD. Dengan demikian, penyelesaian kendala dalam proses penginputan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi, tetapi juga membutuhkan ketelitian, pemeriksaan, perbaikan, dan penyesuaian data.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa prosedur penginputan Rencana Kerja dan Belanja melalui SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan melalui tahapan persiapan data, penginputan, pemeriksaan, perbaikan, dan penyelesaian. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang berkaitan dengan pemahaman pengguna terhadap aplikasi dan prosedur, kesalahan dalam memasukkan data, pemahaman terhadap struktur perencanaan dan penganggaran, serta kendala teknis pada jaringan dan sistem. Kendala tersebut ditangani melalui pemeriksaan data, perbaikan dan penyesuaian data, peningkatan ketelitian, serta penyesuaian proses ketika terjadi kendala teknis.

KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prosedur penginputan Rencana Kerja dan Belanja melalui aplikasi SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu persiapan data, penginputan data, pemeriksaan kesesuaian, perbaikan data, dan penyelesaian penginputan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kendala berupa pemahaman pengguna terhadap aplikasi dan prosedur, kesalahan dalam memasukkan data, pemahaman terhadap struktur perencanaan dan penganggaran, serta kendala jaringan dan sistem. Kendala tersebut diatasi melalui pemeriksaan data secara berkala, perbaikan dan penyesuaian data, peningkatan ketelitian pengguna, serta penyesuaian proses ketika terjadi kendala teknis. Dengan demikian, pelaksanaan penginputan melalui SIPD memerlukan prosedur yang sistematis, ketelitian, pemahaman pengguna terhadap data dan sistem, serta pemeriksaan yang berkelanjutan agar data yang dihasilkan sesuai dengan dokumen perencanaan dan kebutuhan belanja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya Bidang Perencanaan, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan proses pengumpulan informasi yang menjadi dasar dalam penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama pelaksanaan PPL dan penyusunan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga artikel mengenai prosedur penginputan Rencana Kerja Belanja melalui aplikasi SIPD ini dapat diselesaikan dengan baik..

DAFTAR PUSTAKA

- Andhayani, A. (2020). Sistem informasi pemerintahan daerah: E-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 183–193. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>
- Damayanti, S., & Tukiman. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. *Journal Publicuho*, 8(2), 1184–1189. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i2.788>
- Firdaus, Y. F. H., & Cholikh, M. A. (2024). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi. *Reformasi Administrasi*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i1.4073>
- Fitriani, L., & Solikhin, A. (2025). Pengaruh implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh teknologi informasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(5), 1–15. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i05.32328>

- Hayat, U. S., & Yulianty, D. (2023). Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam upaya mencegah terjadinya fraud. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*, 3(2), 202–209. <https://doi.org/10.33197/bes.vol3.iss02.2023.2121>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kumalasari, N. I., & Fanida, E. H. (2024). Peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: Studi pada efektivitas penggunaan platform SIPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. *Publika*, 12(2), 381–394. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p381-394>
- Latifah, I. D. P., Budiati, A., & Putranto, D. R. (2023). Implementation of regional government information systems as online practices for planning, budgeting and administration processes. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 15(2), 498–509. <https://doi.org/10.15575/jpan.v15i2.29057>
- Nyengka, I. C. D., Marlissa, E. R., & Aedah, N. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan anggaran pada BKPSDM Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 10–17. <https://doi.org/10.31957/jkp.v7i1.4414>
- Onta, P. N., Engka, D. S., & Masinambow, V. A. (2024). Analisis perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 25(1), 100–112. <https://doi.org/10.35794/jpekd.52259.25.1.2024>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Rezkiaty, A. H., Alam, S., & Tenriwaru. (2023). Evaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2.1), 1–11. <https://journal.sticamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/7178>
- Sulaiman, S., Martini, R., Ishmaturadhwa, M., & Thoyib, M. (2021). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Mirai Management*, 6(2), 109–116. <https://doi.org/10.37531/mirai.v6i2.1336>
- Tumija, & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(2), 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>
- Tumija, & Ramadhan, A. Z. (2023). Efektivitas perencanaan anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3528>